

CSR Dalam Bingkai Neoliberalisme :

Studi Kasus Perusahaan JOB-PPEJ Di Desa Campurejo

Kabupaten Bojonegoro

Titis Sari Eryadini
Email: titisarieryadini@yahoo.com

RINGKASAN

Penelitian ini adalah penelitian tentang implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan minyak JOB P-PEJ yang ada di desa Campurejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tanggung jawab social perusahaan (CSR) merupakan program yang sudah diimplementasikan oleh JOB P-PEJ dengan baik. Selain untuk memenuhi kewajiban dari pemerintah, ternyata terdapat kepentingan neoliberalisme dari perusahaan agar tetap bertahan dan mampu melaksanakan operasinya sehingga mendapatkan keuntungan. Strategi yang digunakan JOB P-PEJ pun cenderung ke arah agar memperoleh keuntungan yang maksimal dengan menjadi tetangga yang baik.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa memang program CSR yang dilakukan oleh JOB P-PEJ telah memperkuat paham neoliberalisme dalam konstelasi ekonomi politik di Indonesia khususnya di dunia perusahaan.

Kata kunci : corporate social responsibility (CSR), perusahaan, neoliberalisme, konflik

This study was about the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) of the oil company JOB P-PEJ in Campurejo, Bojonegoro. The results showed CSR is a program that has been implemented by P-PEJ JOB well. There is a neoliberal interests of the company to survive and be able to carry out its operations so as to benefit. Strategies used by JOB P-PEJ also tend towards in order to get the maximum benefit by being a good neighbor. However, in practice it turns out there are many conflicts. The conflict is due to people's needs are not the same as the proposal put forward by the committee team. The conclusion that can be drawn from this study that was conducted by CSR program JOB P-PEJ has strengthened understanding of neoliberalism in the constellation of political economy in Indonesia, especially in the corporate world.

Keywords: corporate social responsibility (CSR), corporate, neo-liberalism, the conflict

Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis lebih jauh dan dinamis daripada dunia politik, sosial, maupun budaya. Perubahan dalam dunia bisnis dapat disebabkan oleh perubahan dalam dunia politik seperti demokratisasi, kesadaran hak asasi, gaya hidup dan perubahan pola konsumsi. Belum lagi munculnya globalisasi yang membuat kekuasaan dan pengaruh perusahaan raksasa atau perusahaan di berbagai ranah kehidupan masyarakat semakin kokoh. Kemudian persaingan bisnis pun menyebabkan perusahaan bersaing untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya karena jika keuntungan meningkat maka gaji karyawan naik dan daya beli meningkat.

Istilah CSR hanya diterapkan pada perusahaan. Karena perusahaan merupakan institusi yang dominan di mana perusahaan

pasti berhadapan dengan persoalan lingkungan dan sosial yang mempengaruhi kehidupan manusia. *Corporate Social Responsibility* (CSR) saat ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat umum, sebagai respon perusahaan terhadap lingkungan masyarakat. CSR keterkaitan dengan tanggung jawab sosial, kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Industri dan perusahaan dalam hal ini berperan untuk mendorong perekonomian yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Melalui CSR perusahaan tidak semata memprioritaskan tujuannya pada memperoleh laba setinggi-tingginya, melainkan meliputi aspek keuangan, sosial, dan aspek lingkungan lainnya. Penerapan CSR oleh perusahaan berarti bahwa perusahaan bukan hanya merupakan entitas bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan semata, tetapi

perusahaan itu merupakan satu kesatuan dengan keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi.

Corporate Social Responsibility (CSR), merupakan wacana yang sedang mengemuka di dunia bisnis atau perusahaan. Wacana ini digunakan oleh perusahaan dalam rangka mengambil peran menghadapi perekonomian menuju pasar bebas. Perkembangan pasar bebas telah mendorong perusahaan dari berbagai penjuru dunia untuk secara bersama melaksanakan aktivitasnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat di sekitarnya.

Sebagaimana hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro Brazilia 1992, menyepakati perubahan paradigma pembangunan, dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).¹ Dalam perspektif perusahaan, di mana keberlanjutan dimaksud merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis, berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan dari masing-

masing *stakeholders*. Berbagai peristiwa negatif yang menimpa sejumlah perusahaan, terutama setelah reformasi, seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi para pemilik dan manajemen perusahaan untuk memberikan perhatian dan tanggung jawab yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya di sekitar lokasi perusahaan. Sebab kelangsungan suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh tingkat keuntungan, tapi juga tanggung jawab sosial perusahaan.

Telah banyak upaya perusahaan mengaitkan aktivitas mereka dengan masyarakat di mana mereka beroperasi dan memelihara, bahkan, menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. Namun, tak sedikit pula perusahaan yang gagal memberikan makna kegiatan CSR mereka. Jadilah, semua upaya itu kurang produktif. Dua alasan mengapa upaya gigih perusahaan dalam aktivitas CSR mereka kurang berhasil. Pertama, mereka berpandangan bahwa antara perusahaan

dengan masyarakat saling bertolak belakang. Padahal jelas sekali, di antara keduanya saling terkait, saling membutuhkan. Kedua, banyak perusahaan berpikir CSR sebagai cara-cara standar yang umum untuk strategi perusahaan. Padahal, justru sebaliknya. CSR harus dipandang sebagai satu upaya yang paling tepat bagi tiap strategi perusahaan. CSR dapat digunakan sebagai sumber perkembangan kesuksesan sosial yang luar biasa bagi perusahaan. Kesuksesan sosial ini diraih

perusahaan dengan penerapan sumber daya, keahlian, dan pandangan-pandangan yang tajam dan jernih terhadap berbagai aktivitas yang bermanfaat untuk masyarakat.² Ladang minyak JOB PPEJ di wilayah Kabupaten Bojonegoro telah begitu banyak merubah wajah daerah. Tetapi, satu hal yang sering terlupakan yakni di mana nanti posisi masyarakat Bojonegoro yang berada di bawah garis kemiskinan. Perubahan yang cepat tersebut seolah menjadi sebuah surga bagi pendatang, tetapi bukan bagi penduduk lokal. Walaupun penduduk lokal bisa berpartisipasi, mereka tidak mampu secepat penduduk pendatang. Sementara itu, masuknya sektor ekonomi kapitalis itu tidak serta merta melebur sektor ekonomi subsisten yang menjadi ciri khas dari ekonomi penduduk lokal. Inisiatif pemberdayaan masyarakat untuk mengangkat penduduk lokal agar bisa masuk ke dalam sektor ekonomi kapitalis sudah dilakukan oleh pemda, perusahaan, dan para aktivis dan kelompok elit lokal. Tetapi, tampaknya, selalu ada kendala yang berasal dari faktor internal baik kultur maupun struktur kelas dan sosial dalam masyarakat. Masing-masing perusahaan memiliki cara-cara tersendiri dalam CSRnya. Hal ini dilakukan untuk membangun reputasi sebagai kepercayaan, meningkatkan daya saing dan pencapaian pembangunan berkelanjutan untuk memperbaiki masyarakat dan merangsang perekonomian. Hal ini memberikan indikasi tentang berapa pentingnya CSR dianggap dalam struktur perusahaan dan sebagai bagian dari strategi perusahaan secara keseluruhan.

¹ Rachman, Nurdizal. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Penebar Swadaya. Hal 21

² Suharto, Edi. 2010. *CSR Dan Comdev Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta. Hal 17

Keuntungan atau manfaat yang nyata dapat dicapai perusahaan dengan mengimplementasikan CSR setidaknya ada empat, yaitu: Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra (*image*) yang positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap kapital (modal) seperti memperoleh ijin atau restu bisnis karena dianggap telah memenuhi standar operasi. Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*). Oleh karena itu tidak salah bila saat ini CSR dapat dianggap sebagai investasi masa depan bagi perusahaan. Minat para pemilik modal dalam menanamkan modal di perusahaan yang telah menerapkan CSR lebih besar, dibandingkan dengan yang tidak menerapkan CSR. Melalui program CSR dapat dibangun komunikasi yang efektif dan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat.

Kegiatan CSR yang diarahkan memperbaiki konteks perusahaan inilah yang memungkinkan kesejajaran antara manfaat sosial dan bisnis yang ujungnya untuk meraih keuntungan materi dan sosial dalam jangka panjang. CSR tidak haram dipraktikkan bahkan dengan target mencari untung. Yang terpenting kemampuan menerapkan strategi. Jangan sampai karena CSR biaya operasional menggerogoti keuangan. Jangan pula karena CSR masyarakat justru antipati. CSR lain halnya dengan *building image*.

Dari pernyataan-pernyataan di atas muncullah berbagai pertanyaan yaitu terkait dengan kepentingan neoliberalisme terhadap CSR yang dilakukan JOB P- PEJ, pilihan-pilihan strategic yang digunakan perusahaan untuk program CSR dan respon dan reaksi masyarakat sekitar dengan keberadaan CSR.

Tujuan

Terbukanya pemikiran masyarakat akan hadirnya program CSR dalam perubahan lingkungan seiring berdirinya sebuah perusahaan di sekitarnya menjadi tujuan yang penting.

Manfaat

Menjadi saran dan kritik bagi perusahaan dan pemerintah dalam mengembangkan

kebijakan-kebijakan yang berpijak pada kondisi masyarakat terkait masalah perekonomian masyarakat itu sendiri. Meyakinkan kepada perusahaan akan pentingnya kehadiran masyarakat dalam kelancaran usahanya serta penting adanya timbal balik yang diberikan kepada masyarakat melalui program CSR.

Kajian Teoritik

Teori Ekonomi Politik Neoliberalisme

Bila dilihat sejarah ke belakang ekonomi politik merupakan siklus yang terus berputar, hal ini pula yang mendasari terbentuknya sebuah pemikiran tentang kegagalan dari pemerintah dan adanya proses peminggiran Negara. Dari proses inilah muncul gagasan tentang liberalism klasik yang diusung oleh Adam Smith dalam *The Wealth Of Nation*. Di tahun 1776, ada kesadaran kuat untuk perdagangan bebas baik di Inggris maupun Amerika. Kesadaran baru ini dilahirkan dari kesusahan keadaan ekonomi dan kemiskinan yang diakibatkan oleh Perang kemerdekaan Amerika. Model yang dikembangkan oleh Adam Smith dalam mewujudkan kesejahteraan bersama disebut kebebasan alamiah. Para ekonom menyebutnya teori ekonomi klasik. Intinya, pembatasan perdangan sebagaimana berlakusaat ituoleh kaum merkantilis dianggap hanya menguntungkan kaum pedagang, pemegang monopoli dan penguasa.

Satu dari poin utama *The Wealth of Nations* adalah pasar bebas, ketika kacau dan tidak teratur, sebenarnya dipandu untuk membuat nilai yang benar dan bermacam barang oleh "tangan-tangan tak terlihat". Jika sebuah kelangkaan produk terjadi, misalnya, maka harganya naik, membuat margin keuntungan yang membuat insentif bagi yang lain untuk masuk ke produksi tersebut, dan mengatasi kelangkaan. Jika terlalu banyak produsen yang masuk ke pasar, kompetisi yang meningkat di antara para manufaktur dan kenaikan penawaran akan menurunkan harga di produk tersebut sampai titik di mana harga produksinya.

Smith dengan keras menyerang pembatasan oleh pemerintah di mana batasan tersebut memundurkan ekspansi industri. Faktanya, dia menyerang hampir semua bentuk intervensi pemerintah dalam proses ekonomi, termasuk tarif, berpendapat bahwa hal tersebut membuat inefisiensi dan

harga tinggi pada jangka panjang. Teori ini kemudian dikenal dengan "*laissez-faire*", memengaruhi legislasi pemerintah di tahun-tahun berikutnya, khususnya selama abad ke 19. Pasar merupakan tangan ghaib tempat bertemunya permintaan dan penawaran yang menghasilkan keseimbangan harga. Fungsi utama dari pasar adalah mengalokasikan sumber daya yang ada secara rasional. Di pasar, masing-masing aktor bersaing atau berkompetisi satu sama lain. Pasar adalah motor penggerak kesejahteraan yang merefleksika kebutuhan individu dan keinginan masyarakat, bukan sebagai alat yang digunakan untuk kekuatan politik.³

Smith percaya bahwa semua aktor penyelenggara Negara didorong oleh motivasi yang mulia, yaitu ingin berbuat baik untuk Negara. Namun, ia lebih percaya bahwa campur tangan Negara yang terlalu banyak justru bisa menyebabkan sistem ekonomi menjadi distorsi dan pada ujungnya akan menyebabkan inefisiensi. Adam Smith tidak menyukai campur tangan pemerintah sebab campur tangan pemerintah yang diikuti oleh aturan-aturan yang dibuat oleh pejabat pemerintah akan lebih sering digunakan untuk alat menekan kaum atau kelompok masyarakat yang miskin.

Inti pemikiran Smith adalah bahwa proses produksi dan distribusi ini harus lepas dari campur tangan pemerintah dan perdagangan bebas. Proses ekonomi hanya akan berjalan melalui tangan-tangan tak kelihatan yang mengatur bagaimana produksi dan distribusi kekayaan ekonomi itu berjalan secara adil.⁴

Biarkan para pengusaha, tenaga kerja, pedagang bekerja mencari keuntungan sendiri. Siapapun tak boleh mencampurnya, karena ekonomi hanya bisa muncul dari perdagangan yang adil. Karenanya, pemerintah harus menjadi penonton yang tidak boleh mendukung siapapun yang sedang menumpuk kekayaan dan yang sedang tidak punya kekayaan. Tangan-tangan yang tidak kelihatan akan menunjukkan bagaimana semua bekerja secara adil, secara fair. Peran negara yang minim untuk menjamin bahwa pasar akan bersifat terbuka dan adil. Praktek monopoli dihilangkan, dan negara harus membuat aturan

main yang memungkinkan pasar bebas bisa terjadi. Dari pemikiran inilah maka Smith menyebutnya sebagai liberalisme ekonomi.

Dalam perkembangan terakhir ini terdapat pembaruan dari liberalisme yang disebut neoliberalisme. Kata neo dalam neoliberalisme sesungguhnya merujuk pada bangkitnya kembali bentuk aliran ekonomi liberalisme lama yang cikal bakalnya dipicu oleh Adam Smith tahun 1776. Neoliberalisme adalah kata lain dari "liberalisme baru". Neoliberalisme tidak lepas dari liberalisme, liberalisme pada awalnya adalah perjuangan kaum borjuis dalam menghadapi kubu konservatif. Jadi, tidak salah bila kita katakan bahwa liberalisme merupakan ideologi kaum borjuis. Pada dasarnya ideologi ini memperjuangkan *laissez faire* (persaingan bebas) yakni paham yang memperjuangkan hak-hak atas pemilikan dan kebebasan individual. Neoliberalisme merupakan pendukung pasar bebas (*free trade*), ekspansi modal dan globalisasi. Aktivitas ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar, karena pasar mengajarkan orang untuk berpikir rasional dengan menggunakan kalkulasi untung-rugi. Mekanisme pasar yang ditawarkan kaum neoliberalisme melanggar prinsip keadilan dari John Rawls. Bagi Rawls, dalam kegiatan sosial-ekonomi mesti diperhatikan pula kesejahteraan mereka yang mendapat keuntungan paling sedikit.

Neoliberalisme merupakan bentuk baru liberalism, di mana liberalisme adalah induk dari kapitalisme. Neoliberalisme sebagai sebuah teori dan praktik ekonomi politik yang mengasumsikan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah dengan meliberalisasikan individu dalam sebuah bingkai sistem internasional yang dikarakteristikan oleh jaminan hak asasi yang kuat, pasar bebas, dan perdagangan bebas.

Meskipun liberalism dan neoliberalisme merupakan bagian dari kapitalisme namun ada perbedaan di antara kedua paham ini. Liberalisme menempatkan ekonomi sebagai salah satu bentuk interaksi individu dengan masih membicarakan kepentingan publik, sementara Neoliberalisme

³ Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik: Mencakup Teori Dan Konsep Yang Komprehensif*. Jakarta: Erlangga hal 30 4 Ibid hal 31

menempatkan ekonomi sebagai satu-satunya landasan interaksi antar manusia dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan tentunya termasuk hubungan antar bangsa. Yang sama-sama disepakati oleh liberalisme dan neo-liberalisme adalah mengenai prinsip kebebasan individu dan prinsip anti-negara sebagai landasan perilaku ekonomi karena perekonomian secara otomatis akan mengatur dirinya sendiri untuk sampai kepada titik kemakmuran dan keseimbangan.

Dalam neoliberalisme logika pasarlah yang berjaya diatas kehidupan publik. Ini menjadi pondasi dasar neo-liberalism. Semua pelayanan publik yang diselenggarakan negara harusnya menggunakan prinsip untung-rugi bagi penyelenggara bisnis publik tersebut, dalam hal ini untung rugi bagi pemerintah. Pelayanan publik semata, seperti subsidi dianggap akan menjadi pemborosan. Tidak ada wilayah kehidupan yang tidak bisa dijadikan komoditi barang jualan. Semangat neoliberalisme adalah melihat seluruh kehidupan sebagai sumber laba korporat.

Tatanan masyarakat terbentuk bukan lewat otoritas dan perencanaan, tetapi lewat kinerja *signal* harga dalam dinamika *supply* dan *demand* menurut mekanisme pasar. Pada awalnya bertujuan menciptakan tatanan (*order*) masyarakat yang menjamin kebebasan tiap orang. Kemudian muncullah agenda totalisasi masyarakat atas dasar mekanisme pasar. Akses pada kebebasan tidak lagi ditentukan oleh hak (ciri khas *citizen*), melainkan oleh daya beli (ciri khas *consumer*).⁵

Paham ekonomi neoliberal ini, di kemudian hari dikembangkan oleh Milton Friedman. Menurut Milton Friedman, prinsip utama bisnis ekonomi adalah mencari keuntungan. Menurutnya, tugas dari pebisnis adalah mencari uang/keuntungan (*"the business/task of businessman is business/making money"*).⁶ Hanya dengan cara ini, suatu perusahaan akan bertahan dan bisa menghidupi para karyawannya serta CEO-nya. Tetapi, gagasan ini, kemudian banyak ditentang, karena bisnis tidak semata-mata hanya mencari keuntungan tetapi juga

memiliki tanggung jawab sosial memelihara sumber daya alam dan juga memperhatikan lingkungan sosial bisnis, serta ikut andil mengentaskan pengangguran serta kemiskinan.

Satu kelebihan neoliberalisme adalah menawarkan pemikiran politik yang sederhana, menawarkan penyederhanaan politik sehingga pada titik tertentu politik tidak lagi mempunyai makna selain apa yang ditentukan oleh pasar dan pengusaha. Dalam pemikiran neoliberalisme, politik adalah keputusan-keputusan yang menawarkan nilai-nilai, sedangkan secara bersamaan neoliberalisme menganggap hanya satu cara rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasar. Semua pemikiran diluar rel pasar dianggap salah.

Teori Corporate Social Responsibility (CSR)

Ide mengenai Tanggung jawab Sosial Perusahaan yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)* saat ini menjadi salah satu pembahasan yang sedang tren baik di masyarakat umum, kalangan akademisi, dan tentu saja para pelaku bisnis. Terlebih sejak diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 di mana termaktub mengenai kewajiban perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR. Bahkan untuk memperoleh ISO

26000 yang akan diberlakukan tahun 2009 yang akan datang CSR adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi sehingga ISO 26000 ini disebut pula sebagai *ISO sosial responsibility*.

Banyak argumentasi dan perdebatan mengenai konsep dan definisi tanggung jawab sosial perusahaan itu. Salah satu argumentasi yang sangat terkenal disampaikan oleh Milton Friedman pada tahun 1970 dengan pernyataannya bahwa perusahaan seharusnya tidak memiliki tanggung jawab sosial. Tanggung jawab perusahaan hanya pada bagaimana perusahaan memaksimalkan keuntungan kepada para pemegang sahamnya dan mentaati hukum. Perusahaan dalam pandangan Friedman adalah alat dari para pemegang saham (pemilik perusahaan). Maka apabila perusahaan akan memberikan

5 Priyono, Herry. 2009. *Neoliberalisme Alias Fundamentalisme Pasar*. <http://www.pergerakankebangsaan.org/400> yang diakses pada tanggal 12 September pukul 07.35
6 Samroni, Imam. 2007. *Rakyat dalam "Good Corporate Governance": Posisi, Relasi, dan Skema Keadaban*. Jurnal Studi Agama Millah, Vol. VII, No. 1

sumbangan sosial, hal ini akan dilakukan oleh individu pemilik, atau lebih luas lagi, individu para pekerjanya, bukan oleh perusahaan itu sendiri.⁷

Di lain pihak, para pendukung konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) berargumentasi bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab-tanggung jawab yang lebih luas dari sekedar mencari untung dan taat hukum terhadap para pemegang sahamnya. Tanggung jawab perusahaan itu mencakup isu-isu seperti lingkungan kerja, hubungan dengan masyarakat sekitar, dan perlindungan terhadap lingkungan. Artinya ada unsur nonbisnis dan nonekonomis yang harus dilakukan perusahaan terkait lingkungannya.⁸

Pendapat yang mendukung ide tanggung jawab sosial perusahaan berasumsi bahwa perusahaan tidak hanya mencari keuntungan finansial bagi perusahaan saja. Tetapi perlu juga memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap publik, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan. Hal ini karena masyarakat adalah sumber dari segala daya yang dimiliki dan diproduksi perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan terdiri atas empat dimensi tanggung jawab yaitu, ekonomi, hukum, etika dan *philanthropis*⁹. Dari perspektif ekonomi, semua perusahaan harus bertanggung jawab kepada *shareholder*, karyawan dan masyarakat sekelilingnya dalam hal pendapatan karyawan dan tersedianya pekerjaan. Tanggung jawab hukum adalah perusahaan harus tunduk dan mematuhi peraturan yang berlaku. Kedua tanggung jawab disebutkan di atas merupakan tanggung jawab etika dan kegiatan *philanthropis*.

Tanggung jawab etika merupakan perbuatan yang diterima publik, peraturan pemerintah, *competitor*, kelompok masyarakat, maupun oleh perusahaan itu sendiri. Etika bisnis mempunyai pengaruh yang lebih luas daripada peraturan formal. Melanggar etika merupakan masalah etika akan menghancurkan

kepercayaan. Perusahaan yang melakukan empat tingkat piramida tanggung jawab sosial akan tenang dalam berbisnis melalui komitmen karyawan, pelanggan loyal, *profit* yang memadai, dan didukung oleh masyarakat dan negaranya, serta mempunyai budaya perusahaan.¹⁰

CSR dalam pengertian yang luas dipahami sebagai konsep yang lebih manusiawi di mana suatu organisasi dipandang sebagai agen moral. Oleh karena itu, dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah organisasi bisnis, harus menjunjung tinggi moralitas. Dengan demikian, kendati tidak ada aturan hukum atau etika masyarakat yang mengatur, tanggung jawab sosial dapat dilakukan dalam berbagai situasi dengan mempertimbangkan hasil terbaik atau yang paling sedikit merugikan *stakeholder*-nya. Berdasarkan pandangan ini, sebuah organisasi bisnis dapat memutuskan tindakan atau perilaku mana yang paling etis dalam situasi tertentu dengan menerapkan prinsip-prinsip moral.

Pandangan lebih komprehensif mengenai CSR, dikemukakan oleh Carroll yang mengemukakan teori piramida *Corporate Social Responsibility*. Menurutnya, Tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilihat berdasarkan empat jenjang (ekonomis, hukum etis dan *philanthropis*) yang merupakan satu kesatuan. Untuk memenuhi tanggung jawab ekonomis perusahaan harus menghasilkan laba sebagai fondasi untuk dapat mempertahankan eksistensinya dan berkembang. Tanggung jawab ekonomis ini merupakan hasrat paling natural dan primitif dari perusahaan sebagai organisasi bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Namun demikian dalam mencapai tujuan mencapai laba sebuah perusahaan juga bertanggung jawab secara hukum dengan mentaati ketentuan hukum yang berlaku.¹¹

Dalam kaitan itulah, penerapan CSR dipandang sebagai sebuah keharusan. CSR bukan saja sebagai tanggung jawab, tetapi juga sebuah kewajiban.

CSR adalah suatu peran bisnis dan harus

⁷ Tanudjaja, Bedjo. 2006. *Perkembangan Corporate Social Responsibility Di Indonesia*. Surabaya. Hal 93

⁸ Ibid Hal 94

⁹ Budi, Hendrik. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika Hal 44

¹⁰ Ibid Hal 47

¹¹ Carroll, A. B. 1991. *The Pyramid Of Corporate Social Responsibility: Toward The Moral Management Of organizational Stakeholders*, Business Horizons, Vol. 34 No. 4 Hal 42

menjadi bagian dari kebijakan bisnis. Maka, bisnis tidak hanya mengurus permasalahan laba, tapi juga sebagai sebuah institusi pembelajaran. Bisnis harus mengandung kesadaran sosial terhadap lingkungan sekitar.

PEMBAHASAN

Corporate Social Responsibility JOB P-PPEJ

Setiap perusahaan minyak di Indonesia tentunya mengemban sebuah tanggung jawab untuk dapat mengembangkan masyarakat yang berada di sekitar daerah operasinya. Hal ini dikarenakan aktifitas perusahaan minyak terutama aktifitas lapangan akan selalu berhubungan langsung dengan masyarakat sekitar. Mengingat sektor perminyakan adalah salah satu kekuatan perekonomian Indonesia, maka apabila di suatu daerah di prediksi adanya kandungan minyak, maka mau tidak mau masyarakat harus merelakan sebagian lahannya untuk dapat dieksplorasi karena nantinya hasil dari minyak tersebut akan digunakan untuk menyokong kehidupan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Hal serupa juga dialami oleh Joint Operating Body Pertamina PetroChina East Java (JOB PPEJ). JOB PPEJ adalah sebuah perusahaan yang berada di antara pemukiman penduduk. Oleh karenanya, perusahaan berperan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memajukan kehidupan masyarakat sekitar perusahaan. Komunitas lokal memiliki peran besar dalam jalannya kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan operasional tentunya tidak hanya didukung oleh peralatan-peralatan atau fasilitas-fasilitas yang ada. Namun, didukung pula oleh masyarakat sekitar yang daerahnya terdapat operasi. Masyarakat sekitar juga memiliki harapan tersendiri dengan hadirnya perusahaan JOB PPEJ di antara mereka, yaitu agar kehidupan perekonomian dapat semakin maju dan berkembang.

Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi suatu gagasan yang mampu menjembatani hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat di sekitar. Banyak kalangan, dari masyarakat akademik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sampai para pelaku bisnis yang memperdebatkan hal ini karena beberapa perusahaan multinasional yang telah melakukan praktek CSR keberhasilan meraih keuntungan tidak lagi

ditempatkan sebagai satu-satunya alat ukur keberhasilan dalam mengembangkan eksistensi perusahaan.

Konsep CSR itu sendiri juga telah mengalami perubahan. Konsep CSR yang lamamenyatakan bahwa perusahaan hanya mempunyai tanggung jawab kepada pemegang saham perusahaan saja. Sedangkan konsep CSR yang baru menyatakan bahwa perusahaan juga harus mempunyai tanggung jawab kepada pekerja, pemasok, masyarakat, dan lingkungan di mana perusahaan itu menjalankan kegiatannya.

JOB PPEJ merupakan salah satu perusahaan yang memiliki program CSR guna menjaga hubungan baiknya bersama masyarakat sekitar daerah operasionalnya. Pada tahun 2002, sejak ditemukannya lahan minyak di Desa Campurejo, perusahaan ini telah melaksanakannya program CSR. Program CSR yang berjalan ketika itu masih memiliki nama CD (*Community Development*) yakni program pemberdayaan masyarakat desa sekitar daerah operasional perusahaan. Program-program tersebut meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi.

Infrastruktur pada umumnya meliputi program perbaikan jalan dan program pemasangan lampu jalan yang menunjang jalannya operasionalisasi perusahaan. Program pendidikan yang berupa bantuan-bantuan pendidikan yang masuk ke sekolah-sekolah yang ada di Desa Campurejo. Seperti TK, SD di Desa Campurejo dan yang tersebar di tiga dusun yaitu dusun Plosolanang, dusun Pohagung, dan dusun Mlaten. Pada program kesehatan yaitu program posyandu dan pemberdayaan polindes Campurejo. Sedangkan kegiatan sosial ekonomi dilakukan berupa penguatan- penguatan modal di koperasi Desa Campurejo. Dari tahun ke tahun program-program yang ada semakin bertambah. Program-program tersebut diadopsi sesuai dengan permintaan dari komite CSR di Desa Campurejo.

Pada tahun 2006, CSR ini dibagi menjadi dua oleh JOB PPEJ, yang terdiri dari program PPO/PKPO dan CSR itu sendiri. PPO merupakan kepanjangan program penunjang operasional dan PKPO adalah singkatan dari program kegiatan penunjang operasional. PPO/PKPO ini meliputi pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa di bidang infrastruktur. Sedangkan CSR itu sendiri merupakan program pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi.

Tidak ada yang berbeda sejak awal pelaksanaan CD sampai pada tahun 2006. Hal yang membedakan hanya nama dan darimana dana ini berasal. Pada awalnya semua dana berasal dari pihak JOB PPEJ, namun sejak tahun 2006 sejak program CD itu berubah menjadi PPO/PKPO dan CSR, maka PPO/PKPO mendapat dana kerjasama dengan pemerintah kabupaten dalam mengembangkan infrastruktur penunjang operasionalisasi dan bukan dana milik JOB PPEJ sendiri. Berbeda dengan CSR yang memang murni dari pihak JOB PPEJ sendiri, menjalan program-program pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi hingga saat ini di tahun 2012.

Kepentingan Program CSR dalam Bingkai Neoliberalisme

Corporate Social Responsibility (CSR) saat ini sudah tidak asing bagi masyarakat umum sebagai upaya tanggap perusahaan terhadap lingkungan masyarakat. CSR merupakan tanggung jawab sosial, kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Melalui CSR perusahaan tidak semata memprioritaskan tujuanny pada memperoleh laba setinggi-tingginya, melainkan meliputi aspek keuangan, sosial, dan aspek lingkungan lainnya.

CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *stakeholders*-nya, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan pengoperasian perusahaan. Prinsip perusahaan dapat terlihat dengan adanya hubungan yang harmonis antara perusahaan tersebut dengan masyarakat sekitarnya, yakni menggapai hasil terbaik dengan meminimalisir kerugian bagi kelompok masyarakat lainnya. Hal ini guna menciptakan sebuah keseimbangan dan pemerataan kesejahteraan social ekonomi di masyarakat agar kecemburuan social tidak lagi berpotensi menjadi sumber konflik.

CSR pada tatanan praktisnya harus dialirkan kedalam program-program konkrit. Salah satu bentuk aktualisasi CSR adalah *Community Development*. *Corporate Sosial*

Responsibility (CSR) dipandang sebagai suatu keharusan untuk membangun citra yang baik dan terpercaya bagi perusahaan. Praktik CSR yang berkelanjutan sebagai Investasi Sosial (*Social Investment*) yang berbuah pada lancarnya operasional perusahaan.

Bagi JOB PPEJ program-program CSR ini sangatlah penting. Setidaknya terdapat lima alasan mengapa CSR sangat penting untuk dijalankan oleh JOB PPEJ.

Lima alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Support Operation

Support operation ini berfungsi guna memperlancar akses kepada masyarakat guna kepentingan operasi yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Reputation

Reputation merupakan keperluan memperoleh reputasi baik menjadi tetangga yang baik bagi masyarakat desa.

3. Engagement and empowerment

Engagement merupakan bentuk perjanjian dengan masyarakat desa sekitar daerah operasi serta empowerment yakni pemberdayaan komunitas lokal agar tercipta kondisi yang harmonis di antara perusahaan dan masyarakat sekitar.

4. Corporate proper

Corporate proper ini bermaksud agar terdapat kesinambungan antara pemberdayaan dan reputasi yang baik sehingga masyarakat menganggap perusahaan adalah perusahaan yang baik dan secara tidak langsung kepercayaan masyarakat akan tumbuh dari anggapan bahwa JOB PPEJ adalah perusahaan yang baik.

5. Adaptasi dan mitigasi global warming

JOB PPEJ menjadi bagian dari global reduction dalam proses global warming. Oleh karena itu, formula CSR merupakan bentuk dari adaptasi terhadap adanya global warming. JOB PPEJ memiliki matriks CSR berdasarkan sifat, yaitu:

1. Proaktif

Sifat proaktif adalah sifat CSR yang mampu membuat pilihan dikala mendapatkan rangsangan (stimulus). Bersikap proaktif lebih dari sekedar mengambil inisiatif tetapi lebih kepada bagaimana proses pembuatan keputusan atas respon terkait dengan transformasi sosial dari masyarakat yang terkena dampak dari proses produksi

perusahaan.

2. Reaktif

Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial adalah perusahaan yang memiliki program-program mulai dari luar ke dalam. Maksud dari pernyataan tersebut adalah program-program CSR yang ada merupakan tuntutan atau masukan dari masyarakat kepada pihak JOB PPEJ. Karena perusahaan memandang kegiatan bisnis dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial.

Sifat-sifat CSR dari perusahaan yang berupa proaktif dan reaktif tersebut kemudian oleh JOB PPEJ ditransformasikan ke dalam bentuk CSR berupa *Charity/Philantropik*, transaksional, dan integratif.

Dalam konteks pemberdayaan, CSR merupakan bagian dari *policy* perusahaan yang dijalankan secara profesional dan melembaga. CSR kemudian identik dengan CSP (*Corporate Social Policy*), yakni strategi dan *roadmap* perusahaan yang mengintegrasikan tanggung jawab ekonomis perusahaan dengan tanggung jawab legal, etis, dan sosial sebagaimana konsep piramida CSR-nya Archie B. Carroll.

Piramida CSR yang dikembangkan Archie B. Carroll tersebut harus difahami sebagai satu kesatuan. Sebab, CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *triple bottom lines*, yaitu *profit*, *people* dan *planet* (3P).

Berdasarkan pernyataan yang dijelaskan oleh Archie B. Carroll diatas, maka JOB PPEJ sudah dengan baik melaksanakan empat pilar CSR. Selain untuk memperoleh laba perusahaan sebagai tanggung jawab ekonomisnya, ternyata JOB PPEJ sebagai perusahaan di bidang ekstraktif juga sudah melakukan tanggung jawab- tanggung jawab yang lain, yaitu tanggung jawab legal, tanggung jawab etis, dan tanggung jawab filantropis.

Ketika tanggung jawab yang merupakan satu kesatuan tersebut dilaksanakan dengan baik, maka *triple bottom lines* pun akan tercipta dengan sendirinya, perusahaan tersebut akan

memperoleh laba yang tidak melupakan masyarakat di sekitar perusahaan dan lingkungan di mana dia melakukan operasionalisasi. Pentingnya CSR bagi perusahaan dilandasi oleh kesadaran perusahaan terhadap fakta tentang adanya tataran masyarakat global maupun nasional serta kompetisi di era globalisasi seperti saat ini. Oleh karena itu, diwajibkan atau tidak, CSR bagi perusahaan harus merupakan komitmen dan kepedulian untuk ambil bagian sebagai masyarakat global.

Praktik CSR yang dilakukan oleh JOB PPEJ ternyata lebih condong kepada tanggung jawab ekonomis. Tanggung jawab ekonomis ini merupakan hasrat paling natural dan primitif dari perusahaan sebagai organisasi bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Namun demikian dalam mencapai tujuan mencapai laba sebuah perusahaan juga bertanggung jawab secara hukum dengan mentaati ketentuan hukum yang berlaku.

Pilihan Strategik CSR Perusahaan dalam Bingkai Neoliberalisme

Salah satu karakter dasar CSR, yakni pemberdayaan masyarakat, menjadi semakin jauh dari pencapaian tujuan CSR. Pelaksanaan CSR yang terjebak bias- bias diatas dapat mengubah CSR yang sebelumnya dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat, justru hanya menciptakan ketergantungan masyarakat sebagai penerima program. CSR yang tadinya merupakan wujud kepeduliansosial perusahaan kepada masyarakat, bergeser menjadi strategi masyarakat untuk menyander perusahaan. CSR yang tadinya untuk membangun citra perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berubah menjadi racun yang bukan saja merusak reputasi perusahaan. Melainkan pula menghancurkan modalsosial, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat.

Menurut Keitner dalam Kurniawati¹², beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola CSR perusahaan ialah dengan strategi reaktif, defensif, proaktif, dan akomodatif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam

¹² Kurniawati, S.2005. *Pengantar Manajemen Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana hal 79

tanggung jawab sosial atau CSR cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Lalu strategi defesif dalam CSR yang dilakukan oleh perusahaan dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum. Kemudian strategi akomodatif yang terjadi karena tuntutan dari masyarakat. Terakhir, strategi proaktif merupakan bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan *stakeholders*. Dalam hal ini JOB PPEJ menggunakan strategi proaktif dan reaktif.

Strategi yang dijalankan oleh pihak JOB PPEJ dalam pelaksanaannya CSR adalah dengan *bottom up*. Strategi *bottom up* ini merupakan bentuk dari pendelegasian kekuasaan oleh perusahaan kepada masyarakat karena memang segala bentuk kegiatan diserahkan kepada tim komite yang ada di desa yang merupakan wakil dari masyarakat. Kemudian mendengar tuntutan-tuntutan masyarakat yang serungkali terjadi pihak JOB PPEJ sendiri juga melakukan konsultasi, penetraman, serta negosiasi pada tingkatan partisipasi masyarakatnya. Seperti yang telah dijelaskan diatas peran serta masyarakat sangat dibutuhkan oleh JOB PPEJ.

Terkait dengan permasalahan dan hambatan-hambatan implementasi program atau proyek CSR dari JOB PPEJ, perlu diadakan pendampingan secara lebih intensif lagi. Pendampingan program CSR adalah untuk memastikan terjadinya proses mobilisasi sumber daya lokal. Selain itu, pendampingan ini juga diperlukan guna memonitoring implementasi program atau proyek CSR agar berjalan sempurna. Apabila ditemukan terjadi suatu kesalahan atau penyimpangan maka dapat segera diambil tindakan perbaikan agar sesuai dengan tujuan program. Adanya pendampingan juga pada akhirnya akan mempermudah evaluasi karena kondisi awal program, alur perkembangan program, dan hasil program dapat diketahui sehingga diperoleh saran atau rekomendasi untuk perencanaan program atau proyek selanjutnya. Karena berdasarkan temuan data, pihak JOB PPEJ masih kurang intensif dalam melaksanakan pendampingan, monitoring terhadap jalannya program CSR.

Terwujudnya kemandirian masyarakat memerlukan pendampingan yang intensif, bukan kucuran program CSR yang berorientasi pada penggelontoran proyek-proyek fisik. Pro-

gram-program CSR hendaknya memberikan dukungan terhadap prakarsa warga untuk bekerja keras dengan memberikan sarana dalam mengembangkan keswadayaan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Dengan kata lain, program CSR mendukung proses transformasi sosial ekonomi masyarakat. Keberhasilan program bukan lagi pada inisiatif perusahaan juga, tetapi pada responsivitas dan responsibilitas dari pemangku kepentingan untuk membentuk kemitraan dalam mewujudkan program CSR yang partisipatif. Jadi dalam kasus di Desa Campurejo ini, kurang berhasilnya dan berlanjutnya program-program CSR di desa ini tidak bisa hanya menyalahkan perusahaan saja. Akan tetapi perlu evaluasi juga dari pihak masyarakat sendiri.

CSR Dalam Bingkai Neoliberalisme

Logika kerangka pikir neoliberalisme mengintegrasikan seluruh dimensi-dimensi di atas dan pada akhirnya menyimpulkan bahwa semua itu sebenarnya kembali pada insting dasar manusia yaitu memuaskan kepentingannya sendiri. Dalam periode kapitalisme neoliberal, pemuasan hasrat itu adalah dengan menumpuk laba atau akumulasi kapital atau modal. Konsep CSR merupakan jalan untuk mengakumulasi kekayaan yang kemudian memperlihatkan adanya fenomena kapitalisme neoliberalisme.

Beranjak dari konteks kapitalisme neoliberal di atas maka kita dapat memahami bahwa pada umumnya pengertian CSR akan merujuk dan menunjuk pada suatu tindakan kebaikan hati si kapitalis dalam mengucurkan sebagian keuntungan bisnisnya. Meskipun terkesan nampak baik namun sebenarnya CSR berakar dalam sistem produksi kapitalisme, yang motif utamanya adalah maksimalisasi keuntungan. CSR merupakan salah satu upaya untuk membenarkan terus berjalannya proses akumulasi modal selama ini sebagai hal yang seolah alamiah bagi setiap manusia. Sementara pada saat yang sama, konsep itu terus mengabaikan relasi-relasi kekuasaan kongkrit yang mempertahankan produksi dan reproduksi sistem kapitalisme ini.¹³

Terdapat pengembangan-pengembangan dari CSR itu sendiri, di antaranya, *corporate citizenship*, dan *corporate sustainability*. *Corporate citizenship* menjelaskan tentang pentingnya pelibatan diri perusahaan secara

lebih luas dengan para pemangku kepentingannya (*stakeholders*) dibandingkan dengan para pemegang saham (*shareholders*). *Corporate sustainability* mengacu pada pertimbangan bahwa segala perilaku korporat haruslah sesuai dengan gagasan pembangunan yang berkelanjutan.¹³

Konsep-konsep turunan seperti itu pada prakteknya mencakup hal-hal yang sangat luas. Konsep-konsep itu menjadi instrumen pemandu arah bagi beragam aktivitas belas kasih (*charity*) yaitu mendorong tumbuhnya investasi sosial dalam proyek-proyek komunitas, seperti program pembangunan infrastruktur, program peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dan program penguatan sosial ekonomi yang ditransformasikan dalam berbagai pelatihan dan kegiatan-kegiatan oleh perusahaan JOB PPEJ.

Ketika mendefinisikan hubungan antara dunia bisnis dengan masyarakat, penjelasan CSR yang demikian menjadi penjelasan fungsional. Penjelasan di mana CSR dipandang sebagai upaya suatu perusahaan menjalankan fungsinya yang dibutuhkan bagi keberlanjutan hidup dan stabilitas masyarakat. Seakan-akan tanpa berjalannya CSR, masyarakat tidak akan bertahan. Kemudian yang menjadi masalah berikutnya, perspektif fungsional itu mengaburkan rasionalitas paling mendasar dalam dunia bisnis yaitu akumulasi modal. Hanya saja, memasukkan rasionalitas itu ke dalam analisis CSR tentu menjadi beban berat para pebisnis maupun ahli CSR perusahaan karena artinya sebangun dengan menghilangkan CSR itu sendiri. Hal itu terlihat pada strategi yang dipakai oleh JOB PPEJ yaitu proaktif dan reaktif. Di satu sisi perusahaan seolah menjadi sosok yang dermawan, dan di sisi lain perusahaan ingin menghindari adanya CSR tersebut.

Ketika mendefinisikan hubungan antara dunia bisnis dengan masyarakat, penjelasan CSR yang demikian menjadi penjelasan fungsional. Penjelasan di mana CSR dipandang sebagai upaya suatu perusahaan menjalankan fungsinya yang dibutuhkan bagi keberlanjutan

hidup dan stabilitas masyarakat. Seakan-akan tanpa berjalannya CSR, masyarakat tidak akan bertahan. Kemudian yang menjadi masalah berikutnya, perspektif fungsional itu mengaburkan rasionalitas paling mendasar dalam dunia bisnis yaitu akumulasi modal. Hanya saja, memasukkan rasionalitas itu ke dalam analisis CSR tentu menjadi beban berat para pebisnis maupun ahli CSR perusahaan karena artinya sebangun dengan menghilangkan CSR itu sendiri. Hal itu terlihat pada strategi yang dipakai oleh JOB PPEJ yaitu proaktif dan reaktif. Di satu sisi perusahaan seolah menjadi sosok yang dermawan, dan di sisi lain perusahaan ingin menghindari adanya CSR tersebut.

Berbagai definisi CSR terus menerus dihadapkan pada keadaan keharusan kompetisi ekonomi pasar yaitu menghasilkan keuntungan. Maka alih-alih menyelesaikan masalah-masalah sosial yang diciptakan di sepanjang proses akumulasi kekayaan, konsep tanggung jawab sosial justru malah mengarahkan diri dengan mengaitkannya pada proses-proses belas kasihan. Dalam kasus di perusahaan JOB PPEJ donasi itu hanya mencakup jumlah penerima yang sedikit lewat kucuran keuntungan yang sedikit pula. Hal itu memperlihatkan bahwa tanggung jawab sosial adalah sesuatu yang diberikan kepada suatu program alokasi sumber daya atau sosial transfer yang bermaksud meredakan tuntutan-tuntutan sosial sejauh mereka tidak merecoki tujuan pengejaran keuntungan si kapitalis.

Tidak hanya terbatas, namun konsep CSR juga bersifat mengecoh. CSR sering digambarkan sebagai upaya korporat melayani kepentingan umum, padahal kenyataannya yang dilayani adalah kepentingan modal. Sama mengecohnya ketika sebenarnya konsep itu adalah ideologi yang berfungsi melayani legitimasi kepentingan kelompok *status quo* di dalam masyarakat lewat jalan mempertahankan gambaran hubungan bisnis-

¹³ Suharto, Edi. 2007. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*, Bandung: Refika Aditama hal 45

¹⁴ Kartini, Dwi. 2009. *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. Hal 19

masyarakat yang harmonis. Konsep itu hendak memberikan gambaran wajah kapitalisme yang beradab sehingga dianggap tidak memerlukan lagi kekuatan pengontrol lain untuk menjaga agar tetap akuntabel bagi masyarakat.

Penilaian kritis terhadap konsep CSR seharusnya dimulai dari awal mula dan bagaimana posisi kekuasaan bisnis di dalam suatu masyarakat. Kekuasaan bisnis atau korporat utamanya datang dari akumulasi kekayaan melalui aktivitas- aktivitas perdagangan. Makin banyak keuntungan dan kekayaan yang diperoleh, makin berkuasalah korporat itu. Dengan begitu menjadi jelas bahwa pengejaran keuntungan merupakan prinsip pertama dalam berbisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Masalah yang kemudian muncul bukan karena keuntungan selalu menjadi motif penting orang melakukan bisnis melainkan adalah bahwa dalam dua abad terakhir pengejaran keuntungan menjadi makin terlembagakan di seluruh aktivitas manusia modern. Manusia menjadi makin terciutkan menjadi mesin pengejar keuntungan belaka. Dan hal ini sudah terefleksikan pula pada perusahaan JOB PPEJ. Karena berdasarkan temuan data dan dari informan, yang telah menjabarkan lima objektif dari pentingnya CSR bagi JOB PPEJ.

Salah satu prinsip dari neoliberalisme adalah memaksimalkan keuntungan (*maximizing profit*), dan prinsip itu juga melekat pada perusahaan (*corporate*), dan itulah salah satu yang membedakan antara organisasi nirlaba dengan korporat. Perusahaan yang diteliti yaitu JOB PPEJ, sesungguhnya juga merupakan korporat yang senantiasa memiliki prinsip untuk memaksimalkan keuntungan. Namun demikian, perusahaan tersebut juga tetap memiliki tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungannya, terutama pada masyarakat yang terkena dampak langsung dari operasional perusahaannya.

Terdapat 3 nilai pokok dalam etika bisnis yang perlu diutamakan dalam praktik perusahaan, yakni masalah keadilan (*justice*),

distribusi hasil dan pemerataan (*equality*), dan keberlanjutan (*sustainability*).¹⁵ Perusahaan membutuhkan masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatannya, sebaliknya komunitas dapat memperoleh manfaat dari keberadaan dan kegiatan perusahaan. Apabila tidak ada korelasi positif di antara keduanya maka akan terjadi konflik.

Desain CSR bermacam-macam tergantung tantangan seperti apa yang harus dihadapi oleh masing-masing perusahaan. Industri pakaian misalnya desain CSR lebih difokuskan untuk stakeholder pekerja. Industri jasa desain CSR fokus pada pelayanan konsumen dan marketing. Industri agribisnis desain CSR fokus pada komunitas lokal dan tenaga kerja. Sedangkan industri ekstraktif seperti tambang dan migas desain CSR fokus pada stakeholder komunitas lokal. Dengan demikian secara teoritik terdapat relasi antara variasi dalam desain CSR dengan tantangan yang dihadapi industri bersangkutan. Secara umum keberhasilan CSR dapat dilihat dari capaian nilai etika yang dikandungnya yaitu turut menegakkan sosial *justice*, *sustainability* dan *equity*. Jika desain CSR mencakup substansi yang luas maka CD jauh lebih fokus berkenaan dengan utamanya komunitas lokal dan institusi terkait pada wilayah bersangkutan. Sama halnya dengan CSR, konsep CD memiliki banyak definisi karena dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Namun baik secara akademik maupun praktis, semuanya menyinggung 3 hal yakni kolektiva, proses dan hasil.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* sebagai bagian dari *community development* JOB PPEJ di Desa Campurejo sebagai berikut:

1. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan program yang sudah diimplementasikan oleh JOB PPEJ sebagai objek yang digunakan untuk memperlancar usaha dan eksplorasi minyak

¹⁵ Prayogo, Dody. 2011. *Sosially Responsible Corporation*. Jakarta: UI Press hal 3

dari JOB PPEJ. Dari eksplorasi yang dilakukan inilah perusahaan menjadi eksis dan bertahan serta mendapatkan keuntungan yang maksimal, sehingga dapat dikatakan terdapat kepentingan neoliberalisme dari program CSR yang diimplementasikan oleh JOB PPEJ.

2. Pada umumnya perusahaan belum memiliki rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah dengan program CSR yang akan diimplementasikan. Strategi yang digunakan dalam implementasi CSR oleh JOB PPEJ pada intinya adalah terus menggali wilayah eksplorasi untuk mencari dan mengejar keuntungan yang berlipat. Selain itu untuk meningkatkan citra perusahaan, wujud dari komitmen sosial perusahaan, hanya sebagai bentuk agar memperoleh dan mencapai lima objektif dari perusahaan di satu sisi memang untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam aturan dari pemerintah dan sebagai bentuk kederewanan, namun di sisi lain untuk menguatkan keberadaannya dan operasinya di Desa Campurejo dan terkesan pada kosmetik.

3. Program CSR yang dilaksanakan JOB PPEJ di Desa Campurejo belum bisa dikatakan program *community development* yang sejati karena unsur swadaya dan swadana masyarakat belum terlihat, proses yang ada lebih bersifat filantropis (*derma*) karena secara umum program dirancang oleh perusahaan dan tidak ditujukan untuk mempersiapkan masyarakat pasca operasinya JOB PPEJ serta adanya katub pengaman sosial dari pemerintah yang menyebabkan terjadinya fenomena neoliberalisme.

Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan bagi dunia korporasi untuk berpartisipasi membangun masyarakat, maka program CSR hendaknya direncanakan secara lebih tepat dan bukan hanya dilaksanakan sebagai kosmetik semata. Perusahaan hendaknya memiliki rencana jangka panjang dan jangka menengah dalam mengimplementasikan program CSR, sehingga memiliki makna yang lebih besar dalam jangka panjang. Selanjutnya perusahaan hendaknya melakukan *social mapping* yang lebih detail lagi sehingga program yang dikurcurkan lebih tepat sasaran dan tepat guna. Selain itu kegiatan-kegiatan (program) CSR hendaknya lebih mengarah pada upaya pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat

miskin atau tidak berdaya daripada program-program fisik yang tidak berdampak pada pemberdayaan ekonomi secara langsung.

Perusahaan, pemerintah dan masyarakat adalah tiga komponen yang tidak dapat terpisahkan dalam pelaksanaan CSR, oleh karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pihak JOB PPEJ, pemda atau pemdes, serta masyarakat Desa Campurejo. Perusahaan harus mengubah paradigmanya menjadi *justice and equality* yang nantinya berimplikasi yang menempatkan masyarakat sebagai pemilik sumber alam sebagaimana pemerintah pusat, hal ini untuk mencapai prinsip *justice*.

Mungkin tidak seluruh hal dalam CSR akan bisa diukur dengan eksak, atau diukur dengan satuan ekonomi, namun upaya mengukurnya memang tak bisa dihindari. Pengukuran kinerja CSR juga menjadi ada kalau kita hendak mengetahui sejauh mana CSR terkait dengan keuntungan finansial. Himbauan bahwa penelitian mengenai CSR harus diperkuat di sisi sosial sangatlah tepat.

Kita tak bisa mengandalkan perkembangan CSR semata-mata dari sudut pandang

perusahaan. Banyak analisis yang menyatakan bahwa perkembangan CSR sangat bergantung dari munculnya *critical mass* yang bisa membedakan perusahaan berdasarkan kinerja sosial dan lingkungan mereka. Pembentukan *critical mass* ini sangat bergantung dari pengetahuan yang lebih berasal dari sudut pandang pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, Hendrik. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : Sinar Grafika
- Carroll, A. B. 1991. *The Pyramid Of Corporate Social Responsibility: Toward The Moral Management Of Organizational Stakeholders*, Business Horizons, Vol. 34 No. 4
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik : Mencakup Teori Dan Konsep Yang Komprehensif*. Jakarta : Erlangga
- Kartini, Dwi. 2009. *Corporate Social Responsibility : Transformasi Konsep Sustainability Management dan*

- Implementasi di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama
- Kurniawati, S.2005. *Pengantar Manajemen Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana
- Prayogo, Dody. 2011. *Socially Responsible Corporation*. Jakarta : UI Press
- Priyono, Herry. 2009. *Neoliberalisme Alias Fundamentalisme Pasar*. <http://www.pergerakankebangsaan.org/?p=400> yang diakses pada tanggal 12 September pukul 07.35
- Rachman, Nurdizal. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Penebar Swadaya
- Samroni, Imam. 2007. *Rakyat dalam "Good Corporate Governance": Posisi, Relasi, dan Skema Keadaban*. Jurnal Studi Agama Millah, Vol. VII, No. 1
- Suharto, Edi. 2007. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*, Bandung: Refika Aditama
- Suharto, Edi. 2010. *CSR Dan Comdev Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi*. Bandung : Alfabeta
- Tanudjaja, Bedjo. 2006. *Perkembangan Corporate Social Responsibility Di Indonesia*. Surabaya